SEUNEUBOK LADA

Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan
Vol. 12 No. 1 (2025): 14-27 ; DOI 10.33059/jsnbl.v12i1.11075
ISSN:2356-0770 ; E-ISSN:2685-2705

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA DI PERKEBUNAN DAMAR SIPUT PADA MASA DARURAT MILITER TAHUN 2003-2004

Al Mukaramah Sabita
Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra
sabitadekta@gmail.com

ABSTRACT

The conflict during the Military Emergency period that occurred throughout 2003-2004, affected women workers at PT Damar Siput. Thus, this research aims to examine: what was the situation of the Damar Siput plantation during the Military Emergency period so that it was vulnerable to causing violence against women workers on the Damar Siput plantation and the forms of violence. The method used in this research is a historical method which consists of four stages, namely: heuristics, source criticism, interpretation, and writing (historiography). Based on the research results, it is concluded as follows. 1) The Damar Siput Plantation, which initially ran smoothly, experienced a situation after the implementation of Military Emergency, this situation caused a lot of pressure and violence which was predominantly experienced by female workers. This pressure and violence was carried out by GAM and the army/officials. 2) The forms of violence experienced by workers at the Damar Siput plantation are divided into two, namely, physical violence and psychological violence. Forms of physical violence include beatings and torture/mistreatment. Meanwhile, psychological violence takes the form of threats, taking hostages and killing family members.

Keywords: Military Emergency, Violence, Women.

ABSTRAK

Konflik masa Darurat Militer yang terjadi sepanjang tahun 2003-2004, berpengaruh terhadap perempuan pekerja di PT Damar Siput. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: bagaimana situasi perkebunan Damar Siput pada masa Darurat Militer sehingga rentan menyebabkan kekerasan terhadap perempuan pekerja di perkebunan Damar Siput serta bentuk kekerasannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang terdiri dari empat tahap, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (historiografi). Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan sebagai berikut. 1) Perkebunan Damar Siput yang semula berjalan dengan lancar, mengalami situasi pasca penerapan Darurat Militer, situasi tersebut menimbulkan banyak tekanan dan kekerasan yang dominan dialami oleh pekerja perempuan. Tekanan

dan kekerasan tersebut dilakukan oleh GAM dan tentara/aparat. 2) Adapun bentuk kekerasan yang dialami oleh pekerja di perkebunan Damar Siput terbagi menjadi dua yaitu, kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Bentuk kekerasan fisik berupa pemukulan dan penyiksaan/penganiayaan. Sedangkan kekerasan psikologis berupa ancaman, penyanderaan, dan pembunuhan anggota keluarga.

Kata Kunci: Darurat Militer, Kekerasan, Perempuan.

Author correspondence: Al Mukaramah Sabita

Email: sabitadekta@gmail.com

PENDAHULUAN

Konflik di Aceh yang terjadi pada tahun 2003-2004 atau dikenal dengan istilah Darurat Militer (DM) merupakan konflik lanjutan masa Daerah Operasi Militer (DOM). Secara historis, DOM terjadi sepanjang tahun 1989-1998 dengan pusat penerapan di tiga daerah, yaitu: Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Setelah sempat diberlakukan masa jeda kemanusiaan (1999-2000), konflik kembali meletus di tahun 2001. Salah satu daerah yang menjadi area konflik pada saat itu ialah Aceh Timur, tepatnya di Kecamatan Rantau Selamat. Pada saat itu penduduk setempat menjadi saksi dari pengalaman konflik.

Periode 1 tahun dengan dampak yang luar biasa di Kecamatan Rantau Selamat. Konflik masa DM sangat berdampak bagi masyarakat. Salah satunya masyarakat yang bekerja di perkebunan Damar Siput, Aceh Timur. Perkebunan Damar Siput yang dikenal dengan PT Damar Siput adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Damar Siput, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur. Sebuah perusahaan swasta milik Gani Mutiara.

Perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas areal mencapai 1.488, 95 Ha. Terbentuk pada tahun 1985, tepatnya sebelum masa DM berlangsung, dan perlahan terus berkembang. Hingga akhirnya pada tahun 2001, PT tersebut harus ikut terimbas konflik yang berlangsung. Penerapan DM berpengaruh pada perkembangan perkebunan Damar Siput. Pada tahun 2001-2005 PT Damar Siput harus ikut terimbas akibat konflik pada masa DM.

Kondisi PT Damar Siput yang sedang memuncak dengan baik. Namun, harus mengalami kerugian yang besar ketika konflik DM berkembang. Saat itu, situasi PT

Damar Siput yang awalnya aman dan damai harus menerima tekanan setiap harinya dari pihak konflik yang bersangkutan. PT Damar Siput sangat berperan penting bagi masyarakat setempat, terutama bagi penduduk yang berprofesi sebagai petani.

Hampir seluruh karyawan mengalami situasi traumatik dari kekerasan saat konflik berlangsung. Saat itu, tidak hanya pekerja laki-laki saja yang mengalami tekanan saat konflik. Pekerja perempuan juga akan ikut merasakan kekerasan dan tekanan saat konflik terjadi. Bahkan saat itu perempuan menjadi dominan terimbas kekerasan.

Pada masa DM, perempuan yang bekerja di PT Damar Siput saat itu pasti akan mengalami trauma mendalam akibat kekerasan. Kekerasan saat itu baik berupa kekerasan fisik, maupun psikologis. Berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang menyebabkan cedera atau kematian pada orang lain. Menurut Setiawan (2017: 19), kekerasan merupakan penyiksaan, penganiayaan, atau juga perlakuan yang dilakukan dengan cara tidak benar. Sedangkan kekerasan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai penderitaan atau rasa sakit fisik, seksual, psikologis, paksaan atau perampasan kebebasan yang melanggar hukum dalam keluarga atau bidang lainnya.

Sumera (2013: 47) menjelaskan, bahwa kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan masih ditempatkan dalam posisi salah satu gender lebih rendah yang harus dikuasai dan diperbudak laki-laki. Juga karena perempuan masih dipandang sebagai warga negara kelas dua (second class citizens).

Kekerasan terhadap perempuan memiliki beberapa jenis dan bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun kekerasan secara non-fisik. Menurut Setiawan (2017: 20) adapun jenis kekerasan terhadap perempuan ialah sebagai berikut;

1. Kekerasan fisik, adalah jenis kekerasan yang kasat mata atau siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korban. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dll.
2. Kekerasan non-fisik, yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata atau tidak bisa diketahui langsung perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak

terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu;

a. Kekerasan verbal: kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya: membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebar gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum dengan lisan, dll.
b. Kekerasan psikologis/psikis: kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Contohnya memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan, mendiamkan, mengucilkan, memandang yang merendahkan, mencibir & memelototi.

Berdasarkan penjelasan, maka disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan kekerasan berdasarkan pembedaan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan memiliki beberapa jenis yang umumnya yaitu, kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kemudian kekerasan non-fisik terbagi lagi menjadi dua yaitu, kekerasan verbal dan kekerasan psikologis/psikis. Sehingga mengakibatkan penderitaan/kesengsaraan secara fisik, seksual, dan psikologi yang dapat menyebabkan trauma berkepanjangan bagi korban.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah, yang menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Sjamsuddin (1996) dalam Khusna (2013: 31) yang dimaksud metode sejarah adalah proses menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis bukti dan data-data yang ada sehingga menjadi penyajian cerita sejarah yang dapat dipercaya. Dalam metode sejarah, ada empat langkah yang harus dilakukan dalam menulis penelitian antara lain: Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan yang terakhir adalah historiografi.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil penelitiannya dengan mengunjungi tempat-tempat dan daerah yang terkait akan kejadian, atau di daerah-daerah di mana peristiwa berlangsung. Seperti di Perkebunan Damar Siput, tepatnya di beberapa desa diantaranya Desa Damar Siput, Desa Sarah Kayee, Desa Bayeun, Desa Alue Seulemak,

dan Desa Alue Gadeng. Daerah yang terletak di Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara teknik sejarah lisan. Salah satu bentuk penyampaian informasi dari generasi ke generasi secara lisan. Menurut Dienaputra (2007: 13) sejarah lisan pada dasarnya merupakan rekonstruksi visual atas berbagai peristiwa sejarah yang benar-benar pernah terjadi yang terdapat di dalam memori setiap individu manusia. Dienaputra (2007: 33) juga menjelaskan bahwa sejarah lisan adalah implementasi dengan tiga tahapan kerja, dengan demikian dimulai dari kegiatan kerja berupa; persiapan, pelaksanaan, indeks dan Transkripsi.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Aktivitas dalam analisis data yaitu; *Data Reduction* (Pemilihan Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur Tahun 2001-2005

Kecamatan Rantau Selamat merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Wilayah ini terdapat 14 Desa yaitu, Desa Alue Kaol, Desa Alue Kumba, Desa Alue Punti, Desa Alue Raya, Desa Alue Tuwi, Desa Alur Seuleumak, Desa Bayeun, Desa Damar Siput, Desa Rantau Panjang, Desa Sarah Kayee, Desa Sarah Teubee, Desa Seuneubok Dalam, Desa Simpang Aneuh, dan Desa Simpang Peut. Secara demografis, wilayah Kecamatan Rantau Selamat memiliki luas mencapai 159.80 km2, dengan jumlah penduduk sekitar 8.852 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 3.673 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan mencapai 5.179 jiwa.

Kecamatan Rantau Selamat, secara geografis mempunyai batas wilayah sebagai berikut. Sebelah Timur berbatasan dengan Alue Tuwi-Alur Teh (Kecamatan Birem Bayeun); Sebelah Barat berbatasan dengan Alue Kumba-Buket Selamat (Kecamatan Sungai Raya); Sebelah Utara berbatasan dengan Gajah Mentah-Alue Gureb (Kecamatan Alue Lhok); dan sebelah Selatan berbatasan dengan Bayeun-Alue Itam (Birem Bayeun).

Secara historis, pada masa pasca DOM sampai dengan masa pemberlakukan DM, wilayah Kabupaten Aceh Timur menyimpan banyak sejarah. Kontras (2006) dan Al

Chaidar, dkk. (1998) menjelaskan bahwa Aceh Timur sebagai ‘daerah hitam’. Setelah DOM dihapuskan pada 7 Agustus 1998 kemudian berlanjut dengan peresmian DM dan Darurat Sipil tahun 2001-2005. Konflik terjadi akibat kekerasan yang berhubungan dengan eksistensi GAM.

Pada saat konflik berlangsung di Aceh Timur, kekerasan juga dialami oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Rantau Selamat. Hal tersebut umumnya dirasakan oleh masyarakat yang bekerja di sebuah perusahaan perkebunan swasta bernama PT Damar Siput. Perusahaan ini terletak di Desa Damar Siput. Wilayah Kecamatan Rantau selamat dulunya tergolong aman. Namun pada tahun 2001 wilayah ini menjadi wilayah yang sangat keras, terlebih saat puncak kekerasan berlangsung dengan dahsyat yang terjadi pada tahun 2001.

Saat itu sering sekali terjadinya penembakan, pembakaran rumah, penggeledahan rumah, hingga pembuangan dan menemuan mayat tidak dikenal. Kondisi wilayah Damar Siput awalnya baik-baik saja. Lalu situasi mulai panas saat pembangunan posko Darurat Militer di perkebunan Damar Siput pada tahun 1999. Bahkan para pekerja di PT Damar Siput mulai terimbas kondisi yang ada. Karena, pekerja kena wajib lapor kepada aparat yang berada di Posko Damar Siput.

Tahun 2001, kondisi di Rantau Selamat semakin panas. Hal ini terutama di wilayah sekitar perkebunan Damar Siput. Kondisi pekerja saat itu semakin memburuk, bahkan tidak sedikit yang memilih mengungsi karena takut dibunuh. Situasi saat itu sangat dilematis, jika berpihak pada aparat/tentara, masyarakat akan menjadi sasaran pengikut GAM. Sebaliknya jika berpihak kepada GAM, akan menjadi target kekerasan aparat/tentara.

Puncak kekerasan terjadi pada akhir tahun 2001. Berawal dari kejadian pembunuhan terhadap anggota brimob yang sedang berjaga di Pos Damar Siput. Kasus meninggalnya tentara juga terjadi di Desa Bayeun. Hal ini semakin memicu kemarahan tentara. Maka dilakukanlah penyisiran 1000 jam yang membuat kondisi di wilayah Desa Bayeun khususnya, menjadi sangat mencekam. Sejak kejadian itu, banyak rumah yang dibakar di wilayah Rantau Selamat. Alue Gading misalnya, benar-benar hancur. Dulu banyak rumah permanen, kini hanya tinggal rumah bantuan. Demikian juga di Alue Kaol dan Alue Punti, hampir semua rumah dibakar.

Perkembangan wilayah Rantau Selamat tahun 2001-2005 dipengaruhi oleh situasi politik dan militer dari penerapan DM. Peningkatan tensi konflik di tahun 2000, diawali dari munculnya berbagai aksi kekerasan, baik dari pihak GAM maupun oknum tentara. Aksi kekerasan semakin meningkat dan berpengaruh secara sosial-ekonomi bagi kehidupan masyarakat di Kecamatan Rantau Selamat. Umumnya, mereka mengalami tekanan dan penderitaan akibat; penggeledahan, pembakaran rumah, bahkan pembunuhan anggota keluarga.

Masa Darurat Militer di Aceh (2003-2004)

Darurat Militer (DM) merupakan seperangkat peraturan yang efektif diberlakukan setelah otoritas militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang berkuasa secara resmi. Menurut Saalino (2020: 3) Kata militer yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Salah satu daerah yang pernah mengalami DM ialah Aceh. DM di Aceh merupakan operasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 19 Mei 2003 untuk melawan GAM, yang berlangsung sekitar satu tahun. Saat itu presiden Megawati Soekarnoputri menyatakan, Aceh sebagai daerah dengan berstatus DM.

Menurut McGibbon (2004: 64) dalam Djumala (2013: 76) Megawati sebagai landasan pijak bagi perundingan dengan GAM. Artinya, Pemerintah mau berunding dengan GAM hanya jika GAM mau menerima otonomi khusus seperti diatur dalam undang-undang tersebut. GAM menolak karena elemen-elemen dari otonomi khusus yang termaktub dalam undang-undang, dimaksud diberikan Pusat kepada Aceh secara sepihak, tanpa ada perundingan atau negosiasi dengan GAM. Hal itulah yang menyebabkan resolusi konflik dan perdamaian tidak pernah terjadi.

Dalam buku Peulara Damee, Laporan Temuan KKR Aceh (2023: 38) menjelaskan bahwa hari pertama pemberlakuan DM ditandai dengan pembakaran sejumlah gedung sekolah di beberapa kabupaten/kota di seluruh Aceh. Mayjen TNI Endang Suwarya yang juga penguasa DM menuding GAM sebagai pelaku pembakaran sekolah-sekolah tersebut. Aksi-aksi serupa terus terjadi secara sporadis selama beberapa bulan kemudian. Setahun setelah pelaksanaan DM, TNI mengklaim telah menewaskan 2.439 personel GAM. Selain itu, ada 2.003 personel GAM yang ditangkap dan 1.559 orang yang

menyerah. Sementara di pihak TNI, 147 orang tewas dan 422 luka-luka. Dalam masa darurat itu, puluhan aktivis yang kritis ditangkap dan dihilangkan secara paksa. Tak sedikit pula yang harus hengkang ke luar Aceh.

Zulkarnain (2019: 39) menjelaskan, saat itu banyak terjadi pelanggaran hukum, keadilan tidak berlaku, terjadi kekerasan militer. Saat itu masyarakat Aceh mengalami kekerasan yang dilakukan pihak militer. Penangkapan, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan oleh pihak militer terjadi pada masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh menderita karenanya.

Dalam buku Seri Aceh II, KontraS (2006: 113) menjelaskan bahwa solusi atas persoalan Aceh melalui perang sebenarnya bukan hal baru, karena cara-cara penyelesaian yang dipilih sebelumnya nyaris cenderung selalu serupa, yakni solusi militer yang paling dianggap ampuh. Jika ada perbedaan, status DM merupakan pernyataan terbuka pemerintah untuk menyatakan perang lewat mobilisasi besar-besaran pasukan tempur di bawah payung hukum keputusan resmi Presiden.

Menurut Hutagalung (2004: 15) dalam hal ini pemerintahan Megawati terjebak dalam penyelesaian politik ala Orde Baru dengan kembali melakukan hal yang sama, yaitu memangkas otoritas politik lokal Aceh. Sekaligus mengambil kekayaan alam tanpa memberikan distribusi yang adil. Sekaligus melakukan represi yang berlebihan kepada potensi resistensi yang muncul dari masyarakat dengan menerapkan status DOM sehingga mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa maupun trauma berkepanjangan yang dialami masyarakat Aceh. Kondisi ini melahirkan gerakan perlawanan baru yang dipimpin oleh Hasan Tiro, dan terus berlangsung sampai saat DM diberlakukan di Aceh.

KontraS (2006: 121) menjelaskan bahwa selama setahun DM di Aceh telah terjadi banyak peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hasil yang didapat selama periode waktu itu, bisa dikatakan hanyalah kemunduran derajat penghormatan atas manusia dan kemanusiaan. Matsyah (2003: 141) mengatakan bahwa tragedi di Aceh benar-benar telah di luar kewajaran kemanusiaan manusia. Maknanya, tidak ada siapapun lagi yang sanggup menyelesaikan konflik Aceh-Jakarta, kecuali Allah SWT. Sesuai dengan asas agama, apabila manusia tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka Allah akan menyelesaikannya.

Gempa dan tsunami menghantam bumi Aceh pada pagi hari, di hari Ahad 26 Desember 2004. Tragedi ini menghentakkan seluruh penduduk bumi ini. Tsunami telah

menjadi penggerak mempercepat penyelesaian konflik Aceh yang telah gagal diwujudkan oleh manusia ketika itu. Semua orang tertegun, korban tidak hanya GAM, rakyat sipil, tetapi tentara Indonesia juga ikut menjadi korban dari tragedi tsunami ini.

Berdasarkan penjelasan, maka disimpulkan bahwa DM merupakan seperangkat peraturan yang efektif diberlakukan setelah otoritas militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang berkuasa secara resmi. status DM merupakan pernyataan terbuka pemerintah untuk menyatakan perang lewat mobilisasi besar-besaran pasukan tempur di bawah payung hukum keputusan resmi Presiden. Tragedi ini benar-benar telah di luar kewajaran kemanusiaan manusia. Tidak ada siapapun lagi yang sanggup menyelesaikan konflik Aceh-Jakarta, kecuali Allah SWT. Konflik yang berlangsung di Aceh telah gagal diwujudkan oleh manusia ketika itu, dan menjadikan konflik tersebut sebagai sejarah saat ini.

Situasi Perkebunan Damar Siput Masa Darurat Militer

Konflik DM merupakan konflik lanjutan yang terjadi pada tahun 2003-2004 di Aceh, yang melibatkan dua belah pihak yaitu GAM dan Pemerintah Pusat. Konflik tersebut terjadi karena adanya pemberontakan dari GAM setelah munculnya rasa kekecewaan ketidakadilan bagi rakyat Aceh yang kemudian mengakibatkan lahirnya gerakan perlawanan. Sehingga dari konflik tersebut, menimbulkan terjadinya kekerasan karena adanya pemberontakan dari pihak yang terlibat. Adapun faktor pemberontakan terjadi ialah karena faktor militer dan politik.

Konflik DM yang berlangsung di daerah Kecamatan Rantau Selamat, menjadi peristiwa yang paling bersejarah terhadap masyarakat di sekitaran perkebunan Damar Siput. Pada masa DM, situasi perkebunan Damar Siput sangat menegangkan, kondisi perkebunan Damar Siput pada saat itu tidak berjalan dengan baik. Perkebunan yang sebelumnya berkembang baik, harus mengalami penurunan yang sangat drastis. Perkebunan Damar Siput mengalami situasi terancam, namun perkebunan ini harus tetap berjalan. Ini menjadi salah satu faktor militer yang terjadi pada pekerja di perkebunan Damar Siput.

Adanya faktor militer tersebut, menyebabkan timbulnya tekanan bagi pekerja. Karena merasa terancam dari ancaman yang kerap mereka dapatkan, bahkan menjadi sebagai teror bagi pekerja di perkebunan Damar Siput. Banyak peraturan baru yang

ditetapkan karena kondisi wilayah perkebunan sedang dilanda konflik yang sangat memuncak. Hampir semua karyawan di perkebunan Damar Siput kala itu merasa tertekan.

Terlebih setelah terjadinya kasus meninggalnya seorang tentara di Bayeun karena jatuh ketika hendak mencabut bendera Bintang Buleun (bendera Aceh). Bendera yang dinaikkan di atas pohon kelapa pada pukul dua pagi oleh salah seorang GAM. Bendera Bintang Buleun tersebut berkibar di beberapa tempat di wilayah Bayeun yaitu, di kuburan Dusun Hijrah, di kedai Bayeun, di pajak Bayeun (pasar belanja di Bayeun), di samping kantor camat Bayeun, dan di titi Bayeun. Semua bendera mencakup 12 lembar bendera yang berhasil dikibarkan.

Setelah meninggalnya seorang tentara tersebut memicu konflik semakin panas dan berkelanjutan dengan hebat antara tentara dan GAM. Hingga menyebabkan beberapa wilayah harus ikut terimbas konflik pada masa DM, yang menelan banyak korban. Konflik pada saat itu juga semakin panas setelah terjadinya kasus pembakaran sekolah dasar (SD) Alue Seuleumak dan SMA Bayeun oleh GAM. Saat itu alasan pembakaran kedua sekolah tersebut adalah, agar terhindar dari bangunan yang akan dijadikan pos tentara atau markas.

Pembakaran kedua sekolah tersebut bahkan terjadi ketika sedang adanya pengungsian masyarakat. Pembakaran gedung sekolah saat itu berlangsung saat malam hari. Semua yang mengungsi terpaksa harus keluar dari gedung sekolah dan dibawa ke tempat pengungsian wilayah lain. Hal ini menjadi salah satu faktor politik yang berlangsung pada saat DM.

Saat konflik berlangsung, karyawan di perkebunan Damar Siput harus mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan oleh aparat/tentara seperti, setiap karyawan di perkebunan Damar Siput harus bersedia mengumpulkan/menyetor KTP masing-masing di pos aparat/tentara. Pos tersebut berada tepat di persimpangan loding perkebunan Damar Siput, hal ini guna melakukan absen setiap karyawan di perkebunan Damar Siput terhadap peraturan yang ditetapkan. Dan setiap karyawan akan mengambil kembali KTP masing-masing saat pulang atau jam bekerja telah selesai.

Pemeriksa KTP tidak hanya dilakukan di perkebunan Damar Siput saja, namun di luar wilayah tersebut juga dilakukan. Setiap orang yang bertemu dengan aparat/tentara, akan dimintai untuk menunjukkan KTP masa pemberlakuan DM yang diberlakukan sejak

Juni 2003 hingga masa penerapan DM berlangsung. Hal ini sebagai salah satu kebijakan yang ditetapkan di seluruh wilayah penerapan DM. Tujuannya ialah, untuk mengeliminasi kombatan GAM yang dinilai tidak dapat mengurus KTP tersebut.

Terlebih mereka sudah terdata sebagai pemberontak terhadap publik. Bahkan pengurusan KTP juga dilakukan dengan sangat ketat, proses pengurusan KTP harus dilakukan dengan sendiri, tidak boleh diproses oleh orang lain. KTP tersebut berwarna merah putih berukuran 13x10 cm. Begitu juga dengan supir truk sawit maupun truk muatan kayu, yang melintasi jalan dari luar menuju ke wilayah pedalaman melewati pos tersebut.

Setiap supir truk wajib melapor terlebih dahulu, dan mereka akan diperiksa/diintrogasi di pos. Beberapa pertanyaan harus dijawab dengan jujur oleh mereka seperti; siapa nama supir, ke mana truk akan pergi, berapa banyak muatan yang dibawa, ke mana muatan sawit atau kayu akan dibawa, kepada siapa muatan akan diberikan, dan lain sebagainya. Semua pertanyaan yang diberikan harus dijawab dengan jujur dan jelas. Karena jawaban itu menentukan muatan yang dibawa oleh supir truk akan diizinkan masuk atau tidak.

Begitu juga dengan ekonomi pekerja di perkebunan Damar Siput, kala itu pendapatan pekerja juga sangat menurun. Hal itu karena perkebunan Damar Siput harus membayar pajak untuk pihak tentara dan juga pihak GAM. Terjadinya DM membuat para pekerja atau masyarakat setempat menjadi sempit dalam mencari mata pencarian. Karena mereka tidak dapat bergerak dengan leluasa seperti sebelum adanya konflik.

Hal itu dikarenakan setiap gerak-gerik mereka selalu dipantau, baik oleh aparat/tentara maupun anggota GAM. Siapa pun itu, jika salah satu diantara pekerja tersebut diketahui bersangkutan antara dua belah pihak, maka pekerja itu akan dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut. Hal ini merupakan strategi antara GAM dan aparat/tentara guna dalam menangkap musuh pada saat itu. Karenanya tidak sedikit pekerja memilih untuk mengungsi ke tempat pengungsian yang disediakan pada saat itu, tepatnya di Alue Gadeng Kecamatan Birem Bayeun.

Banyak pekerja perempuan memilih untuk mengungsi, karena pada saat itu perempuan sangat dominan dalam penyelidikan saat konflik berlangsung. Terlebih jika pekerja perempuan yang memiliki anak dan keluarga, ketakutan menjadi alasan untuk mereka mengungsi guna menghindari dan menyelamatkan diri dari tekanan dan

kekerasan yang dapat terjadi kapan pun. Terlebih mereka sudah banyak menyaksikan kekerasan yang berlangsung setiap harinya dengan terang-terangan, dan bahkan dapat disaksikan dengan jelas.

Bentuk Kekerasan Pada Perempuan Pekerja di Perkebunan Damar Siput

Kekerasan yang terjadi di era DM bukanlah kejadian yang dianggap sepele, melainkan menjadi sebuah kejadian yang paling membekas terhadap korban dari kekerasan tersebut. Pada konflik ini, kekerasan tidak hanya merujuk pada kaum laki-laki saja, namun perempuan juga menjadi target kekerasan pada masa itu. Hal ini tentu menjadikan trauma mendalam bagi setiap korban, seperti yang terjadi pada perempuan pekerja di perkebunan Damar Siput, Kecamatan Rantau Selamat. Beberapa diantaranya menjelaskan bahwa pada saat konflik terjadi, hampir semua pekerja di perkebunan Damar Siput mengalami tekanan setiap hari dari pihak yang bersangkutan, baik dari GAM maupun dari aparat/tentara.

Terlebih beberapa dari pekerja yang bersangkutan dengan pihak-pihak yang menjadi incaran saat konflik terjadi, misal salah satu diantara pekerja di perkebunan itu memiliki sangkut paut dengan GAM, maka akan diselidiki dengan lanjut oleh aparat/tentara. Begitupun sebaliknya, jika salah satu diantara mereka diketahui berpihak pada aparat/tentara maka akan menjadi sasaran penyelidikan dari GAM. Pada masa itu, banyak perempuan pekerja di Perkebunan Damar Siput mengalami pengalaman kekerasan saat DM berlangsung. Bahkan pengalaman itu menjadi trauma yang sangat membekas hingga saat ini bagi korban yang mengalami kekerasan saat itu.

Kekerasan terjadi bukan hanya pada mereka saja, melainkan juga pada anak-anak mereka pula. Kekerasan yang terjadi secara terang dan jelas itulah yang menjadikan penyebab adanya trauma bagi setiap korban pada saat itu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan memiliki beberapa bentuk, seperti kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Dari kekerasan fisik yang terjadi terbagi dua bentuk yaitu; pemukulan dan penyiksaan/penganiayaan. Sedangkan bentuk kekerasan psikologis terbagi menjadi tiga bentuk yaitu; ancaman, penyanderaan, dan pembunuhan anggota keluarga.

1. **Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik merupakan tindakan seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan luka atau cedera, menimbulkan penderitaan dan intimidasi, serta kematian. Kekerasan fisik biasnya dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik antara pelaku dan korban. Seperti yang dialami oleh perempuan pekerja di perkebunan Damar Siput pada masa DM. Adapun bentuk kekerasan fisik yang terjadi pada umumnya terhadap perempuan pekerja di perkebunan Damar Siput seperti, pemukulan, dan penganiayaan/penyiksaan.

2. **Kekerasan Psikologis**

Kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang menimbulkan rasa ketakutan pada seseorang yang mengalaminya. Kekerasan itu umumnya berbentuk ucapan yang menyakiti seseorang, penghinaan terhadap seseorang, pengancaman, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan tekanan atau trauma bagi orang tersebut. Begitu juga yang dialami oleh beberapa perempuan pekerja di perkebunan Damar Siput saat masa DM. Bentuk kekerasan psikologis umumnya yang dialami seperti, ancaman dan pembunuhan anggota keluarga.

KESIMPULAN

Situasi perkebunan Damar Siput pada masa DM menimbulkan banyak tekanan dan kekerasan. Perkebunan Damar Siput yang semula berjalan dengan lancar, harus mengalami situasi pasca penerapan DM. Selama DM berlangsung, pekerja di perkebunan Damar Siput kerap sekali mengalami tekanan dan kekerasan yang dominan dialami oleh pekerja perempuan. Tekanan dan kekerasan tersebut dilakukan oleh GAM dan tentara/aparat.Adapun bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan pekerja di perkebunan Damar Siput terbagi menjadi dua yaitu, kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Bentuk kekerasan fisik berupa pemukulan dan penyiksaan/penganiayaan. Sedangkan kekerasan psikologis berupa ancaman, penyanderaan, dan pembunuhan anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Ajidar Matsyah. (2023). *Perjanjian Helsinki 2005 di Aceh Model Penyelesaian Konflik Abad 21 (Perspektif Siasah Syar'iyah).* Banda Aceh: Bandar Publishing.

Daniel Hutagalung. (2004). "Memahami Aceh Dalam Konteks: Analisis Atas Situasi Aceh: Kajian Atas Situasi Darurat Militer di Aceh 2003-2004". *Jurnal Aceh Working Group, Monograf*. No. 2.

Elmarianti Saalino. (2020). *Hukum Militer di Indonesia*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia.

Helius Sjamsuddin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.

Iskandar Zulkarnain, dkk. (2019). "Traumatic Experience During Aceh Military Operations Area (DOM) on the Openness of Local Communities against Migrant Residents in Burni Pase Village, Aceh Province". *Tesis:* Universitas Sumatera Utara.

Khusna. (2013). "Peranan Supeni Dalam Bidang Politik Tahun 1945-1970". *Thesis*: Universitas Pendidikan Indonesia.

KKR Aceh. (2023). *Peulara Damee (Merawat Perdamaian).* Banda Aceh: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR Aceh.

KontraS. (2006). *Seri Aceh II, Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta : KontraS Jakarta.

Marcheyla Sumera. (2013). "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan". *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. 1. No. 2.

Reni Nuryanti & Bachtiar Akob. (2019). *Perempuan Dalam Historiografi Indonesia (Eksistensi dan Dominasi).* Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.

Reza D. Dienaputra. (2007). *Sejarah Lisan: Metode dan Praktek.* Bandung: Penerbit Balatin.

Rino Wahyu Budi Setiawan. (2017). "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekerasan Dalam Berpacaran di SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto dan SMK Bakti Purwokerto". *Skripsi:* Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto.